

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
DANA DESA DI DESA SUMBER URIP KECAMATAN
SELUPU REJANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencukupi Syarat-syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

ESTI WULANDARI
NIM:16631037

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
IAIN CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada,
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Esti wulandari
NIM : 16631037
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana
Desa di Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang

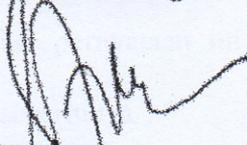
Sudah dapat diajukan dalam siding Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 11 Februari 2022

Pembimbing I



Dr. M. Istian, SE., M. Pd., M.M.
NIP: 19750219 200604 1 008

Pembimbing II



Ratih Komala Dewi, S.Si., MM
NIP: 199006192018012001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI HAINAN CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

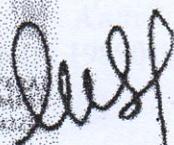
Nama : Esti Wulandari
NIM : 16631037
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang* tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 07 Februari 2022



Penulis,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 120 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **Esti Wulandari**
NIM : **16631037**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa di Desa Sumber Urip Kecamatan SelupuRejang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at 03 juni 2022**
Pukul : **07.30-09.30 WIB**
Tempat : **Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 1**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

**Budi Birahmat, MIS
NIDN. 2012087801**

Sekretaris,

**Albuharj, M.H.I
NIDN. 2020116902**

Penguji I,

**Hendrianto, MA
NIDN: 202168701**

Penguji II,

**Andriko, ME.Sy
NIP. 19890101 201903 1 019**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusefri, M.Ag
NIP 19700202 199803 1 007**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, prodi Perbankan Syariah, untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

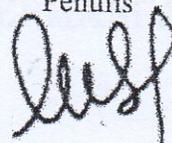
1. Dr. Rahmad Hidayat M.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Dr. Muhammad Istan, M.Pd., MM selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Ratih Komala Dewi, S.S.i., MM selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.

6. Bapak Noprizal MA.g selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Seluruh dosen di lingkungan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Seluruh mahasiswa prodi perbankan syariah angkatan 2016 dan Kepala desa beserta masyarakat Sumber Urip tempat peneliti melaksanakan penelitian yang telah berpartisipasi selama peneliti melaksanakan penelitian.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, 7 february 2022

Penulis



ESTI WULANDARI

NIM: 16631037

MOTTO

**DALAM HIDUP ITU SEDERHANA, TIDAK PERLU
TERLIHAT SEPERTI PALING PENTING, TIDAK PERLU
TERLIHAT SEPERTI PALING BERPERAN, TIDAK PERLU
TERLIHAT SEPERTI PALING HEBAT, TETAPI DALAM
HIDUP ITU JADILAH YANG PALING BERMANFAAT
BAGI ORANG LAIN**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karena waktu adalah hal yang paling berharga didunia serta orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan kita merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus serta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini adalah persembahkan saya kepada :

1. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan sangat aku banggakan yaitu ayahandaku Supriyanto dan ibundaku Suryati yang selalu memberikan do'a yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang tak terhingga, yang tak kenal lelah memberikan motivasi, semangat, arahan, bimbingan baik secara material maupun spiritual, yang selalu berjuang serta bekerja keras hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Adik-adik yang aku sayangi dan banggakan yaitu, Dewa Ardiansyah dan Krisna Hermansyah serta sepupuku Satriyo sanjaya, yang selalu memberikan semangat, menjadi teman sejarah untuk menggapai kesuksesan bersama membahagiakan orang tua.
3. Untuk dosen pembimbing I (Dr. Muhammad Istan, SE.,M.Pd., MM) dan dosen pembimbing II (Ratih komala Dewi, S.Si.,MM) yang telah membimbingku hingga akhir, sehingga skripsiku dapat terselesaikan.
4. Untuk dosen pemimbing akademikku Noprizal MA.g terimakasih yang selalu memberikan motivasi selama ini.
5. Untuk sahabatku (Listia Fitriani,Endang Palupi, Dewi Ratna Sari, Intan Nurlian Elisa S.E, Silvi Fitriyani S.Kom) yang tak hentinya membantu dan berdoa tulus ikhlas dalam penyelesaian skripsi.
6. Untuk teman-teman KKN kelompok 41 Cawang lama(Eni Widiанти S.Pd, Yahya Kusuma S.Pd).
7. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2016, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsinya ini. Teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah serta, Agama,Bangsa, Almamaterku tempatku menuntut ilmu, IAIN Curup.
8. Untuk Sarijok S.Pd yang telah ikut dalam segala rutinitas kegiatanku, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan semoga apa yang telah kita lakukan mendapat rahmat dari sisi Allah SWT,. Aamiin Ya Rabbal A'lamin.

ABSTRAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA DESA DI
DESA SUMBER URIP

Oleh:

Esti Wulandari

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipasi yang memberi kepercayaan dan kesempatan sangatlah diperlukan di Desa Sumber Urip yakni pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perencanaan, pelaksanaan, partisipasi dan evaluasi pembangunan daerah yang melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik suatu peristiwa. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang di peroleh dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilokasi Desa Sumber Urip melalui wawancara, arsip atau dokumen. Data sekunder diperoleh dari jurnal, arsip-arsip atau dokumentasi dari kantor desa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan lalu memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan berdasarkan sumber daya yang di miliki Desa Sumber Urip. Didalam tahap perencanaan betul-betul harus dijalankan secara terpadu antara fasilitator beserta seluruh masyarakat sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program pemberdayaan masyarakat. Tahap Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan. Tahap Partisipasi dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan dan pemberdayaan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Tahap Evaluasi pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. menerapkan kerjasama masyarakat melalui program dana desa dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan, Pelaksanaan, Partisipasi, Evaluasi, Dana Desa.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Literatur	8
G. Defenisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pemberdayaan Masyarakat	
1. Pengertian pemberdayaan masyarakat	20

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	21
3. Prinsip Pemberdayaan	22
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat	23
5. Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat	25
6. Tujuan dan Manfaat Perencanaan	27
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perencanaan	29
8. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	30
9. Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat	32
10. Faktor Pendorong Partisipasi	34
11. Evaluasi Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	35

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa.....	37
2. Prinsip Dasar Dana Desa	38
3. Cakupan Program Dana Desa	38
4. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	40
5. Pelaksanaan Dana Desa.....	41

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Urip

1. Sejarah Singkat Desa Sumber Urip	43
2. Kondisi Demografis.....	45
3. Kondisi Sosial.....	46
4. Kondisi Ekonomi.....	48
5. Struktur Kepengurusan Desa Sumber Urip	49

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Dana Desa Dalam Partisipasi

Masyarakat di Desa Sumber Urip Kecamatan

Selupu Rejang..... 50

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Program Anggaran Dana Desa 58

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dari sisi bidang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pertahanan dan keamanan.¹

Pembangunan desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan pembangunan masyarakat desa (PMD), dan pembangunan desa (bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “*Pemberdayaan masyarakat desa (PMD)*”. Pada masa orde baru secara substansi pembangunan desa lebih bersifat top-down, pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan,

¹ Siti Muntahanah, *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas* Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Poerwokerto:2009, h.2

pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya program inpres desa tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. program pembangunan desa lebih bersifat *button-up* atau kombinasi *button-up* dan *top-down*. Program pembangunan desa yang bersifat *button-up* tertuang dalam undang-undang otonomi daerah(OTDA).² Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama masyarakat yang lemahnya dalam berpartisipasi, dan kelompok yang terabaikannya. Didukung agar meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.³

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Secara sederhana masyarakat ikutserta dalam perencanaan, pelaksanaan, partisipasi, dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat. Pada realitanya masyarakat berpartisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil dengan hadir sebagai penerima manfaat ketika pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan masalah di atas, maka dari itu peneliti akan meneliti secara

² Azwardi Sakanto " Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan " (Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, 2012) hal.30

³ Totok Mardikanto & Poerwoko, Soebianto, Op.Cit, hal 61

mendalam bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang di biayai oleh Anggaran Dana Desa.

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasinya adalah:⁴

- a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam undnag-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah maupun undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi di anggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁵

Untuk memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Maka pemerintah desa memanfaatkan Anggaran Dana Desa sebagai sumberdaya dana

⁴ Totok Mardianto & Poerwoko, *Soebinto, Op.Cit, hal. 81*

⁵ *Ibid, hal. 84*

yang akan membiayai program pembangunan desa. Anggaran Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan setiap desa adalah adanya kepastian keuangan pembiayaannya.⁶

Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan di Desa Sumber Urip yakni pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang di biayai oleh ADD di masyarakat. Salah satu upayanya adalah menerapkan kerjasama masyarakat melalui program Anggaran Dana Desa dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh ADD dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna menghindari akibat yang lebih buruk dalam jangka panjang.

Salah satu desa yang mendapatkan anggaran dana desa di Kecamatan Selupu Rejang di Desa Sumber Urip adalah desa yang kurang pembangunannya seperti pembangunan jalan ataupun pengerasan jalan. Sebelum adanya anggaran dana desa sarana dan prasarana perkantoran desa masih manual,

⁶ Hasil wawancara Bapak Sigit Widianto, wawancara, 15 September 2021

seperti saat ini yang sudah menggunakan komputer dan laptop seperti menulis dengan pulpen dan mesin ketik, pembangunan sangat terbatas, pembangunan kantor desa tidak bisa terpenuhi karena sulit untuk mengatur dan membagi anggaran sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan jalan.⁷

di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang tingkat partisipasinya adalah untuk kelancaran dan mempercepat pembangunan, masyarakat desa selalu meluangkan waktu untuk bergotong royong dan memberikan sumbangan material untuk menambah volume pembangunan yang sangat terbatas. Setelah adanya anggaran dana desa atau pembangunan partisipasi masyarakat mulai meningkat dan adanya lapangan kerja bagi yang tidak ada pekerjaan tergantung kemampuan setiap individunya. Masyarakat di desa sumber urip adalah tingkat kerjasama dan tolong menolong antar sesama masyarakat sangat tinggi.

ADD sudah terdapat perubahan pada masyarakat atau lebih baik dari sebelumnya dan program-program yang telah dilaksanakan adalah seperti pembangunan jalan, pembangunan balai desa, rabat beton/pengerasan jalan, pembinaan posyandu, karang taruna, dan unit wisata sebagai pusat kelola potensi desa wisata.⁸

Pemberdayaan masyarakat yang di maksud adalah proses dimana masyarakat, terutama masyarakat yang lemahnya dalam berpartisipasi dan kelompok yang terabaikannya, didukung agar mampu meningkatkan

⁷ Hasil wawancara dengan bapak sigit widianto, 15 september 2021

⁸ Hasil wawancara dengan bapak yudi sutanto, 18 september 2021

kesejahteraannya secara mandiri untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada di masyarakat dengan cara mendorong, memberi motivasi akan potensi yang mereka miliki sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik itu dalam segi partisipasi maupun dalam segi sosial.

Jadi berangkat dari permasalahan di atas lah membuat penulis tertarik membuat karya ilmiah yang berjudul : “ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa Di Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang

B. Batasan Masalah

Pada intinya penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan maka penelitian ini untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada di masyarakat, dengan cara mendorong, memberi motivasi (membangkitkan kesadaran) akan potensi yang dimiliki Desa Sumber Urip.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa di Desa Sumber Urip?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa di Desa Sumber Urip?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adalah :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa di Desa Sumber Urip.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, pengetahuan, dan pemikiran bagi akademisi dalam hal pemberdayaan program Dana Desa di Kecamatan Selupu Rejang
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.
- c. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan program Dana Desa di Sumber Urip

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemberdayaan program Dana Desa di Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang.

- b. Bagi kepala Desa/aparatur Desa, penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan tentang sistem pemberdayaan masyarakat, dan menjadikan Desa lebih baik lagi.
- c. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat tentang sistem pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan para peneliti terdahulu. Seperti lokasi penelitian, metode penelitian, analisis yang digunakan dalam penelitian, rumusan masalah yang berbeda, serta tujuan penelitian yang berbeda.

F. Kajian Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca sebagai berikut:

1. Riska Yuliani Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020, Skripsi “

Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”.

Masalah pada penelitian ini adalah menganalisis pengalokasian, pengelolaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap penyerapan tenaga kerja serta persepsi aparatur desa di Kabupaten Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sumber data yang di dapatkan secara primer dan

sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Chindy Permata Putri Universitas Airlangga 2020, skripsi “ **Pemberdayaan Masyarakat studi kasus di Bumdesa Ijen Lestari, Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi**”.

Masalah pada penelitian ini adalah BUMdesa merupakan salah satu lembaga sosial yang menjadi wadah masyarakat untuk mengembangkan potensi dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BUMdesa Ijen Lestari pada masyarakat Tamansari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data observasi dan dokumentasi analisis data dilakukan dengan penarikan kesimpulan.

3. Litasen Universitas Sriwijaya 2021, skripsi “ **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa**”.

Masalah pada penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan segala potensi atau partisipasi yang ada di masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi atau partisipasi yang ada di masyarakat sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi.

4. Jihan Fadhillah Universitas Jenderal Soedirman 2021, **”Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa Studi Kasus Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”**

Masalah pada penelitian ini adalah pemberdayaan melalui pemanfaatan Dana Desa sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan desa yang sudah berjalan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

G. Definisi Operasional

1. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan.⁹ Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata. Jadi dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun

⁹ Zubaedi, *pengembangan masyarakat wacana dan praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup) , hal. 43

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

2. Dana Desa

Dana desa telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB desa.¹⁰

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi lebih focus utama dalam membangun pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ini ada di pedesaan. Didalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahanan Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui tiga jalur, meliputi: Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan peran serta dan Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan daya saing daerah. Pemerintahan memberikan Dana Desa (selanjutnya akan

¹⁰ M. Istan, *Implementasi Dana Desa Di Desa Air Meles Bawah kecamatan curup Timur, Rejang Lebong Bengkulu*

disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten/kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari pemerintahan desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintahan di atasnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.¹¹ Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada pengumpulan data lapangan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan yang dibiayai oleh anggaran Dana Desa di Desa Sumber Urip.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹²

¹¹ Marzuki *Metodologi Riset panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta:Ekonsia, 2005), Cet. Pertama, Ed. ke-2, h. 14

¹² Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), h. 8

Menurut Irawan Soehartono penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.¹³

Penelitian yang sifatnya menggambarkan ini, mengukapkan data-data, uraian yang berbentuk kalimat pertanyaan yang diperoleh dari anggota, pengurus dana desa melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Subjek Penelitian

Pada intinya penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang Maka subjek penelitian ini adalah masyarakat dan pengurus Desa Sumber Urip.

Data yang diperlukan sendiri dalam penelitian ini diperoleh dari informasi masyarakat dan pengurus Dana Sumber Urip yang berperan serta berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Mengingat subyek penelitian ada di Desa Sumber Urip ini tidak sekedar pengurus saja melainkan juga masyarakat sekitar, maka penulis tidak mengambil seluruh subjek penelitian, tetapi sebagian saja yang di anggap mewakili dan penulis menggunakan metode *simple random sampling*. Yaitu penulis memilih secara acak, tanpa melihat tingkatan dari masing-masing masyarakat tersebut.

¹³ Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu social Lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995) , h. 35

Oleh karena itu informasi yang akan diperoleh diharapkan merupakan informasi yang benar-benar akan dapat mengetahui Pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa Sumber Urip.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini akan dilakukan di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang.

4. Sumber data

Adanya maksud dari sumber data pada penelitian ini ialah, pengumpulan data yang akan peneliti lakukan terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Urip yang berperan aktifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹⁵. Data ini yang berkaitan dengan data-data dari kades desa Sumber Urip literatur lain yang relevan dengan pembahasan.

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D* (Bandung Alfabeta) , h. 225

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D* (Bandung Alfabeta) , h. 225

5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Kepala desa dan Masyarakat Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹⁶

Untuk memperoleh data yang akurat dalam dalam penelitian, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa tehnik-tehnik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek dengan subyek penelitian dengan seksama dengan menggunakan seluruh alat indra¹⁷.

Dalam penelitian ini observasi berperan serta yang digunakan adalah participant observasi berperan serta Menurut Becker dan Geer, observasi partisipasi adalah yang paling komprehensif dari semua tipe strategi penelitian.¹⁸ Dengan observasi partisipan ini, peneliti dapat memahami lebih dalam tentang fenomena (prilaku atau peristiwa) yang terjadi dilapangan. jadi dalam observasi ini peneliti terlibat dengan

¹⁶ *Ibid*, h. 224

¹⁷ *Vivi Meditasari, Persepsi Santri Ma'had Al-jamiah STAIN CURUP Terhadap Manajemen KoperasiManajemen Koperasi Santri, skripsi (Program Studi Perbankan Syari'ah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN CURUP 2017*

¹⁸ *Rumlan Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media 2014) , h. 163*

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan melakukan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹

Dalam hal itu peneliti mengadakan wawancara langsung dengan para masyarakat Sumber Urip dan perangkat desa Sumber Urip untuk memperoleh data yang akurat mengenai pemberdayaan masyarakat di Sumber Urip.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini jenis wawancara tidak berstruktur. Yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Adapun dalam penelitian ini yang diwawancarai nantinya oleh peneliti adalah masyarakat Sumber Urip.²⁰

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasusklinis,

¹⁹ Lexi j. Moelong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung;Pt Remaja Rosdakarya (2016) , h. 186

²⁰ Sugiyono, *Op. Cit*, h. 140

dan bagian dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²¹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Berdasarkan buku Sugiyono, tentang analisi data penelitian kualitatif dilapangkan model Miles and Huberman, menguraikan bentuk analisis data.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. seperti telah dikemukakan semakin lama penelitian kelapangannya, maka jumlah data yang akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok. seperti pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa di Desa Sumber Urip.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

²¹ *Ibid.*, h. 179

²² *Ibid.*, h 244

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²³ jadi, reduksi data ini merupakan suatu penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁴

c. *Conculusion Drawing/vertification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁵ kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid akan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis , singkat

²³ *Ibid.* , h 247

²⁴ *Ibid.* , h. 249

²⁵ *Ibid.* , h. 252

dan jelas. yakni dari pengumpulan data penyajian data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam *Oxport English Dictionary* adalah terjemahan dari *empowerment* yang mengandung dua pengertian: (1) *to give power to* memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (2) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.¹

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui mengubah struktur sosial
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas di arahkan agar mampu menguasai atau berkuasa kehidupannya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan

¹ Anita fauziah, *pemberdayaan masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, (Malang 2009), h. 17.

potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²

Oleh karena itu agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat dari beberapa ilmuwan yang salah satu di antaranya menurut *Robinson* menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan, kemampuan pribadi kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.³

Pengertian masyarakat menurut Gillin dan Gilling adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama islam.⁴

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan , mnendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.⁵

² Zubaedy, *pengembangan masyarakat: Wacana dan Praktek*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013)edisi ke-1, h. 24

³ Gideens, Anthony, *Sociology*, Cambridge, polity Pres. Thn 1991, h. 356

⁴ Only s. priyono dan A. M. W Pranata, *Mengenai Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementas*, (CSIS: Jakarta, 1996) h. 48

⁵ M Indra Maulana''Peran Dana Desa dalam memberdyakan masyarakat ditinjau dari prespektif ekonomi islam (studi kasus didesa sinar Palembang kec. Candipura, kab lampung selatan)'' skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2018 h, 28

Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengetasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, penuntasan krmiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan.⁶

3. Prinsip pemberdayaan

Setiap manusia yang ingin sukses dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaannya hendaknya memiliki prinsip dalam bekerja, karena hanya manusia yang punya prinsip yang dapat bekerja sesuai dengan aturan dan komitmen yang telah dibangun dan disepakati bersama dengan seluruh tim kerja, baik para pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat/agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang meliputi.⁷

- a. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi yang berbeda, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan.
- b. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran.

⁶ Oos M. Anwas, *pemberdayaan masyarakat di Era Global* h 51

Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran.

- c. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.
- d. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan local, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.
- e. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.⁸

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Adanya program pembangunan nasional
- b. Adanya teknologi tepat guna yang telah dikembangkan dipedesaan dan berhasil meningkatkan hasil pembangunan.
- c. Adanya proyek bantuan pemerintah (inpres dalam pemerataan pembangunan).

⁸ Aswas, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, 2014, h. 58-60

- d. Adanya lembaga-lembaga desa yang membantu pelaksanaan pembangunan didesa.⁹

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah adanya program pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN adanya aset pembangunan berupa sumberdaya alam yang perlu di tingkatkan pemanfaatan, adanya teknologi tepat guna yang telah dikembangkan di pedesaan dan berhasil meningkatkan hasil pembangunannya, adanya proyek bantuan pemerintah, dan adanya lembaga-lembaga desa yang membantu pelaksanaan pembangunan didesa.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa adalah:

- a. Adanya perbedaan kemajuan antar kelompok masyarakat dalam arti ada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
- b. Belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan dalam masyarakat.
- c. Belum terjadi pemerataan hasil-hasil dan bantuan-bantuan pemerintah dalam pembangunan.
- d. Kurangnya sumber daya manusia SDM yang mampu merencanakan dan mempola pembangunan.
- e. Perbedaan budaya, agama, kebiasaan, tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat.

⁹ M syaifuddin, *Pembangunan Masyarakat Dengan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Majalah Mufidah Media Informasi Dakwah Pembangunan, Vol 12 juli 1999, h. 27*

f. Adanya perbedaan pola pikir tingkat pendidikan dalam masyarakat.¹⁰

Dengan demikian faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah: adanya perbedaan antara kemajuan kelompok masyarakat, belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan, belum terjadinya pemerataan hasil-hasil dan bantuan-bantuan pemerintah, kurangnya sumberdaya manusia yang mampu merencanakan pembangunan, perbedaan budaya, agama, kebiasaan, tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat dan adanya perbedaan pola pikir tingkat pendidikan dalam masyarakat.

5. Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sangat penting dalam mempersiapkan pelaksanaan suatu program/kegiatan pembangunan bagi masyarakat, serta sangat menentukan berhasil tidaknya suatu program pembangunan. Perencanaan merupakan fungsi pertama dari empat fungsi manajemen lainnya (pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi). Jika perencanaan suatu program/kegiatan disusun dengan baik dan tanggungjawab, berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, serta didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, yang berasal dari hasil informasi berbagai pihak yang terkait/stakeholder, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek, maka dapat diperkirakan bahwa kesuksesan suatu kegiatan akan dapat terwujud.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, definisi perencanaan adalah sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan, atau

¹⁰ *Ibid*, h. 27

pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang. Berdasarkan pada definisi tersebut, maka ada empat elemen dasar dalam perencanaan, yaitu :

a. Merencanakan berarti memilih

Artinya bahwa tahap perencanaan ini adalah proses pemilihan sumber daya yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

Artinya tahap ini dilakukan suatu proses alokasi besarnya sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pilihan berarti menentukan prioritas pembangunan daerah, baik fokus (sektoral) yang menjadi prioritas.

c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai.

d. Perencanaan untuk masa depan

Bahwa perencanaan merupakan suatu tahap yang diperlukan untuk masa depan, misalnya perumusan visi suatu daerah yang disertai dengan indikator kinerja, untuk mengukur pencapaian target dari visi tersebut.¹¹

Selanjutnya dikemukakan bahwa perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan pengawasan, termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pengawasan diperlukan dalam perencanaan agar tidak terjadi

¹¹ Ir. Hendrawati Hamid, M.Si. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, (Makassar, Penerbit De La Macca, 2018), h.73-74

penyimpangan. Pengawasan dalam perencanaan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang melekat dengan perencanaannya, sedangkan pengawasan represif adalah merupakan pengawasan yang bersifat fungsional atas pelaksanaan suatu rencana, yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.

Dapat disimpulkan pengertian diatas bahwa inti dari suatu perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹²

6. Tujuan dan Manfaat Perencanaan

Masyarakat sangat perlu memahami betapa pentingnya tujuan dan manfaat tahapan perencanaan pada suatu program/kegiatan pembangunan kemasyarakatan, sehingga acuan utama perencanaan betul-betul disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sebagai calon penerima manfaat.

Menurut Usman (2013:76) tujuan dan manfaat perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan Perencanaan

- 1) Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya.
- 2) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan/program

¹² Ir. Hendrawati Hamid, M.Si. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, (Makassar, Penerbit De La Macca, 2018), h.75*

- 3) Mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasi/keahlian maupun kuantitasnya.
- 4) Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.
- 5) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu.
- 6) Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan yang dilaksanakan.
- 7) Menyelaraskan dan memadukan beberapa sub kegiatan.
- 8) Mendeteksi hambatan/kesulitan yang bakal ditemukan.
- 9) Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

b. Manfaat Perencanaan

- a. Standar dan pengawasan (memfasilitasi monitoring dan evaluasi)
- b. Pemilihan berbagai alternatif terbaik (pedoman pengambilan keputusan)
- c. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan.
- d. Mengemat pemanfaatan sumberdaya organisasi
- e. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
- f. Alat untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan pihak terkait
- g. Alat untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti (untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul)
- h. Meningkatkan kinerja (keberhasilan organisasi tergantung keberhasilan perencanaannya).

7. Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Perencanaan

Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan betul-betul harus dijalankan secara terpadu antara fasilitator beserta seluruh masyarakat karena tahapan ini sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam suatu program pemberdayaan sangat penting didalam program pemberdayaan masyarakat seringkali melibatakan yang namanya perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program kemasyarakatan untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan sosial masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mmiliki sifat terpadu karena melibatkan pihak terkait, yang dimana mempunyai keterkaitan dalam bekerjasama mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi terhadap program yang dilaksanakan.

Perencanaan program, dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur kerja sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan), dan upaya pemcahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan penerima manfaat yang ingin dicapai.¹³

Lebih lanjut dikemukakan beberapa pokok pikiran meliputi :

- 1) Perencanaan program, merupakan suatu proses yang berkelanjutan artinya, perencanaan program merupakan suatu rangkaian kegiatan

¹³ Venugopal dalam *Mardikanto dan Soebiato, 2012 : h.236-237*

pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) yang dikehendaki.

- 2) Perencanaan program dirumuskan oleh banyak pihak artinya, dirumuskan oleh fasilitator bersama masyarakat penerima manfaat dengan didukung oleh para spesialis, praktisi, dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan masyarakat setempat.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.

8. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

George R.Terry definisi pelaksanaan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan. dalam tahap pelaksanaan pada pemberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembangkan dan mengembangkan peran serta aktif dan keterlibatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang telah lama dilaksanakan dalam masyarakat, pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat secara terarah dan terprogram diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, yang berarti kesejahteraan

masyarakat meningkat. Dalam pemberdayaan masyarakat ada tahapan yang harus dilakukan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yaitu:

- a. Tahap Penyadaran yaitu masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Tahap Pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya tahap ini sering juga disebut dengan capacity building dan system nilai.
- c. Tahap Pendayaan pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian.¹⁴

9. Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat

Definisi partisipasi menurut Keith Davis dan John W. Nestrom adalah keterlibatan mental emosional orang-orang dalam suatu kelompok, yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, dan berbagi tanggungjawab pencapaian tujuan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. partisipasi masyarakat sering kali di sebut sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut mikkelsen biasa digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum. Partisipasi adalah kontribusi sukarela

¹⁴ Dwidjowijoto, *Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Pendidikan Manajemen vo. 10 (1), 2018: 146-154*

dari masyarakat dalam suatu proyek(pembangunan) tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi adalah proses membuat masyarakat membuat masyarakat lebih peka dalam jangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan jadi menurut penulis partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan dan lain sebagainya.

Dari pengertian partisipasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam berbagai kegiatan pembangunan, dapat lahir karena adanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain masyarakatlah yang memotivasi diri sendiri untuk berperan, serta partisipasi masyarakat yang timbul akibat adanya dorongan atau motivasi dari luar.¹⁵

a. Pengembangan Masyarakat melalui Partisipasi

Dalam pengembangan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan, karena perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, yaitu:

- 1) Identifikasi masalah, masyarakat bersama dengan para perencana atau pemegang otoritas kebijakan melakukan identifikasi permasalahan dalam bentuk diskusi kelompok.

¹⁵ Craight Mayo dalam Hikmat, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2010, h.4

- 2) Proses perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi.
- 3) Evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan apakah memberikan hasil guna (manfaat bagi masyarakat).

b. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkatan partisipasi masyarakat, partisipasi memiliki makna keterlibatan. Pemberdayaan sangat terkait dengan demokrasi atau kebebasan individu atau masyarakat yang dimulai adanya kesadaran akan kebutuhan dan potensinya. Pemberdayaan prinsipnya menghindari unsur paksaan atau tidak demokratis. Dalam kenyataannya dilapangan, bisa terjadi adanya partisipasi masyarakat yang tidak didukung, oleh kesadaran dan demokrasi.

Prasyarat untuk terjadinya partisipasi dalam pembangunan dalam pembangunan menurut Slamet dalam Anwas adalah adanya kesempatan, ada kemampuan dan keterampilan, serta ada kemauan dari masyarakat tersebut. Kesempatan harus diciptakan seluas-luasnya melalui berbagai aktivitas yang riil dalam masyarakat. Kegiatan riil ini hendaknya yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sasara. Menciptakan kesempatan berpartisipasi antara lain melalui :

- 1) Pengembangan sumber daya alam yang tersedia
- 2) Memfasilitasi pasar yang terbuka untuk mengembangkan sesuatu
- 3) Membantu membangun sarana dan prasarana

- 4) Mendorong terciptanya kesempatan dan lapangan pekerjaan .

10. Faktor Pendorong Partisipasi

Mendorong partisipasi merupakan bagian dari proses pengembangan masyarakat kondisi ini mendorong partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesempatan suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.
- b. Adanya kemauan sesuatu mendorong/menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi .

Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor diseperti kehidupan manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. ¹⁶ pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial.

11. Evaluasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat evaluasi merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu kegiatan monev akan dapat diketahui efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksanakan, apa

¹⁶ Hikmat, *Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, h. 143-144

sebabnya berhasil dan apa sebabnya mengalami kegagalan, serta bagaimana tidak lanjutnya. Kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan pada hasil dari monitoring evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program.

Secara umum dikenal dua tipe evaluasi yaitu *on going evaluation* atau evaluasi terus menerus, *ex-post evaluation* atau evaluasi berakhir tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu, misalnya per tri-wulan. Per-semester selama proses implementasi . tipe evaluasi yang kedua dilakakukan setelah implementasi suatu program atau rencana evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

Evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah dari penilaian yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan miliki.¹⁷

a. Tujuan evaluasi

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kegiatan. Untuk

a. ¹⁷ Mardikanto dan Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan publik, Bandung 2012, h. 264

itu pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlu memahami betul tentang tujuan evaluasi sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
- 2) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- 3) Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana.

b. Prinsip-prinsip evaluasi

Hal yang paling mendasar dalam evaluasi adalah untuk mengetahui terlebih dahulu kegiatan dan objek apa saja yang dapat dijadikan bahan ada lima objek prinsip-prinsip evaluasi :

- 1) Program seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran tertentu.
- 2) Kebijakan ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
- 3) Organisasi sekumpulan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Produk adalah keluaran atau output yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan tertentu.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.¹⁸

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sumber modalnya berasal dari dana Desa. Menurut Permendes No. 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

¹⁸ www.djpk.kemenkeui.go.id, diakses hari jum'at, 23 juli 2021, pukul 19. 29

¹⁹ Muhammad Istan, *implementasi Dana Desa Di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Ecces (Economics, social, and Development Studies)*, 2017, 4. 2:128-142

2. Prinsip Dasar Dana Desa

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 3 tentang prinsip penggunaan Dana Desa 2016 sebagai berikut:

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan dan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.²⁰

3. Cakupan Program Dana Desa

Royat mengemukakan bahwa rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

- a. Pengembangan masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipasi, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional

²⁰ <https://sekolahdesa.or.id> diakses pada tanggal 23 juli 2021. pada pukul 20. 55 WIB

pendampingan masyarakat, dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi.

Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayah.

b. Bantuan langsung masyarakat

Komponen bantuan langsung masyarakat adalah dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang di rencanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok yang kurang berpartisipasi dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak.

Kegiatan terkait dalam komponen ini di antaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan pengembangan program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan

kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

4. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat pedesaan di artikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalah nya bersama. pembangunan daerah pedesaan di arahkan sebagai berikut:

- a. Untuk pembangunan Desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM). Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (perdagangan, pertanian, dan industri) antara desa, antar pedesaan dan perkotaan.
- b. Untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh pembangunan didesa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan didesa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama beakar budaya wilayah Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 pemendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif, pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di Desa menjadi tanggung jawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APB desa dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa di bantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.

5. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir, yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan sah dan siap diimplementasikan. Dalam pelaksanaan alokasi dana desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya.²¹ Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerja sama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki.

²¹ Bernandus Seran Kehik, Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan, Jurnal Agribisnis vo.3(1) h. 4-6

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan, dalam tahap pelaksanaan program dana desa di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang, telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan dengan memasang pengumuman di papan yang telah disediakan yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan penggunaan anggaran dana desa di tahun 2021 telah ditunjukkan untuk masyarakat desa sebesar 70% dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang. Anggaran dana desa yang ditunjukkan untuk pemberdayaan masyarakat ini di tunjukan untuk pembangunan fisik desa dan penguatan kelembagaan desa lainnya sebesar 30% dari alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan sebagai operasional penyelenggaraan BPD, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.²²

²² Siti Ainul, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntabilitas* vo.4 (2),2017: h. 148-152

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Urip

1. Sejarah singkat Desa Sumber Urip

Desa yang dahulu nya dari hutan belantara ini ditemukan oleh orang Belanda dan dibuka pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Tuan *Reinsen*. Pada saat itu diberi Nama *Ondemening* Bukit Kaba sampai dengan tahun 1953 setelah Indonesia Merdeka dan Tahun ini juga Wilayah *Ondemening* Bukit Kaba dibagi menjadi 4 bagian wilayah tersebut di antaranya Batang Gelang, Sumber Bening, Sambirejo, dan Mojorejo. Setelah pembagian desa tersebut khususnya masyarakat batang gelang langsung menunjuk Bapak Ismail Sebagai Kepala Desa yang pertama dan Beliau menjabat selama 2 Tahun.

Pada tahun 1955 masyarakat melakukan pemilihan Kepala Desa yang ke-2 dan berakhir pada tahun 1960. Pada masa kepemimpinan Bapak Mulyadi inilah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dari masyarakat kemudian Batang Gelang Berubah Nama menjadi Sumber Urip Pada Tahun 1958. Setelah masa jabatan Bapak Mulyadi habis maka peran Kepala Desa di pegang oleh Bapak Mugiman Sebagai Kepala Desa yang ke-3 hingga berakhir pada Tahun 1965.

Kemudian pada tahun 1968-1968 Sumber Urip Dipimpin oleh Bapak Baudin pada masa ini lah pembangunan mulai masuk ke Desa dan Pertama adalah pembangunan Sekolah Dasar Negeri, lalu kemudian pada tahun 1968-1977 Sumber Urip dipimpin oleh Bapak Suratno pada tahun

1983 pada masa kepemimpinan Beliau inilah terjadi pemekaran Desa Sumber Urip yang diberi Nama Karang jaya Pada tahun 1982 dan pada waktu batas wilayah Sumber Urip mengalami perubahan, untuk wilayah Utara berbatasan langsung dengan Desa Karang Jaya , sebelah timur berbatasan dengan desa Talang Lahat, selatan berbatasan dengan Hutan Wisata Bukit Kaba, dan untuk wilayah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Bening.

Kemudian pada tahun 1983-2000 Desa Sumber Urip di pimpin oleh Bapak Supeno selama kepemimpinan beliau inilah pembangunan desa masuk kembali, salah satunya pembangunan **PUSKESMAS** pada tahun 1983, yang kemudian menjadi PUSKESMAS Induk pada tahun 1985 dengan Dokter Pertama yaitu Bapak Rustam dan pada tahun 1983 itu juga dibangun **BALAI DESA** pada masa inilah memenangkan Lomba Desa sebagai Desa Teladan Tingkat Provinsi mewakili Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta pada tahun 1984.

Setelah masa jabatan Bapak Supeno berakhir untuk selanjutnya digantikan oleh Bapak oleh Bapak H. Tarsoem dan beliau menjabat sampai dengan tahun 2008, dan di tahun 2008 sampai 2009 Sumber Urip dipimpin oleh Bapak Makmun sebagai Kepala Desa sementara menggantikan posisi Bapak H. Tarsoem, pada tahun 2015 masa jabatan Bapak Yudi Sutanto telah habis dan dilanjutkan PLT Bapak Sumiyanto sampai Tahun 2016 dan bapak Yadi sutanto terpilih kembali sebagai Kepala Desa yang baru sampai sekarang.

2. Kondisi Demografis

Provinsi Bengkulu terletak dibagian Barat Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dengan Pantai lebih \pm 525 KM dan Luas wilayah 32. 365, 6 KM² yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak \pm 567 KM².

Desa Sumber Urip adalah salah satu Desa di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan Luas wilayah 650 hektar jarak dari desa ke Ibukota Kecamatan 7 km jarak desa ke Ibukota Kabupaten 17 km. adapun batasan-batasan Wilayah Sumber Urip adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Lahat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Wisata Bukit Kaba
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumber Bening

Wilayah Sumber Urip 60% berupa daratan yang sebagian besar di manfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama : sayur-mayur, dan 40% wilayah daratan digunakan untuk perumahan penduduk sekitar, iklim Desa Sumber Urip sebagaimana desa-desa lain yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempengaruhi terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di Desa Sumber Urip.

Tabel 1. 2 Luas wilayah Desa Sumber Urip dan pemanfaatannya

No	Luas lahan	Luas (ha)
1	Pemukiman	27, 30 ha
2	Perkebunan	589 ha
3	Perkarangan	30 ha
4	Prasarana Umum	1, 70 ha
5	Perkantoran	2 ha
	Luas desa	650

3. Kondisi Sosial

Penduduk Desa Sumber Urip berasal dari Berbagai Daerah dimana mayoritas penduduknya Asli Suku Jawa sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal, yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dari pada menggunakan jalur hukum.

Hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat Desa Sumber Urip mempunyai jumlah penduduk 2295 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1178 jiwa, perempuan 1117 jiwa, dan 670 KK yang terbagi dalam 6 wilayah dusun, dengan rincian Sebagai Berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah
Tidak sekolah	550 orang
pra sekolah	670 orang
SD	850 orang
SLTP	450 orang
SLTA	430 orang
DEPLOMA	20 orang
S1	21 orang
S2/S3	10 orang

Tingkat SDM di Desa Sumber Urip termasuk kategori rendah secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia menginjak remaja.

Tabel 1. 4 Sarana Prasarana Umum Desa Sumber Urip

No	Sarana/Prasarana Desa	Jumlah / volume	Lokasi
1	Kantor	1 unit	Dusun IV
2	Masjid	1 unit	Dusun III
3	Musholah	5 unit	Dusun I-V1
4	Posyandu	1 unit	Dusun IV
5	Pos ronda	8 unit	Dusun I-VI

Lanjutan Tabel 1. 4 Sarana Prasarana Umum Desa Sumber Urip			
6	Gedung PAUT	1 unit	Dusun IV
7	Gedung SD	1 unit	Dusun I
8	Gedung SLTP	1 unit	Dusun I
9	Gedung serbaguna	1 unit	Dusun I
10	TPU	1 titik	Dusun II
11	Jalan poros/Hot mix	± 5 KM	Desa
12	Jalan telfrond/Perkerasan	± 1 KM	Dusun I-VI
13	Jalan lapisan penetrasi	± 5000 M	Dusun I-VI
14	Jalan rabat beton perekebunan	± 1000 M	Dusun I-VI
15	Jalan rabat beton dalam desa	± 5000 M	Dusun I-VI
16	Jalan tanah/setapak	± 5000 M	Dusun I-VI
17	SPAL	± 100 M	Dusun I-VI
18	Lapangan sepak bola	1 titik	Dusun I-VI
19	Psiting center	1 unit	Dusun VI

4. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sumber Urip, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah ke bawah dan RTM sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat atau menengah atas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional.

Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer, dan pelayanan jasa lainnya.

5. Struktur kepengurusan Desa Sumber Urip

Tabel 1. 5 pengurus Desa Sumber Urip

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Komisaris/penasehat	Yudi Sutanto	Kepala Desa
2	Badan pengawas/pemeriksa	Sigit Widiyanto Setio Rini Sudiono	Ketua Sekretaris Anggota
3	Pelaksanaan operasional	Sumarno Sugeng Irwanto Setio Rini Sigit Widiyanto Eli Yuningsih Heriono Heriono	Kepala direksi Bendahara Sekretaris Ka. Unit jasa penyimpanan Ka. Unit jasa keuangan Ka. Unit pengelolaan ESDA Ka. Unit wisata

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Program Dana Desa (DD) dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang

Partisipasinya masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari perencanaan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal yang ada desa. Bentuk sumbangsih masyarakat bukan hanya berupa tenaga melainkan juga bisa buah fikiran

keterlibatan masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci penting dalam keberhasilan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desadi Desa Sumber Urip dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya adalah ikut dalam kegiatan perencanaan yang meliputi musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa.

Proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Sumber Urip dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Musrenbangdes merupakan musyawarah yang dilakukan ditingkat desa yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat desa. Dalam musyawarah tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang dan sektor di masing-masing kampung untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan musrenbang akan dibahas pada Musrenbangdes untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudhi susanto selaku Kepala Desa Sumber Urip menyatakan bahwa:

“ Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan, ya kita mengadakan musrebang, dimulai dari musrebang ditingkat desa. Itu kan masyarakat kita undang. Jadi disitulah partisipasinya, mengajukan usulan, memberikan pendapat. Kemudian usulan di rangkum dan nantinya ditetapkan menjadi RKPDes dan APBDDes. Nah di desa itu kan tidak semua usulan masyarakat terealisasi. Nanti kita ambil skala prioritas. ”¹

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Sutanto selaku Kepala Desa Sumber Urip, Tanggal 15 september 2021, pkl 16:00 WIB

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di Desa Sumber Urip adalah keikutsertaan merumuskan program serta ide, pendapat dan buah pikiran pada musyawarah yang sedang berlangsung. Sehingga dalam musyawarah tersebut dapat menghasilkan output perencanaan program desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri.

Terkait perencanaan program kerja tersebut menurut Bendahara Keuangan Desa Sumber Urip, partisipasi masyarakat dalam tahap ini sudah dilakukan dengan baik, Menurut penjelasannya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes yang mencapai 80% dari semua masyarakat yang di undang. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Yudho Iskandar selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumber Urip menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sudah bagus, karena semua yang dikurirkan baik mulai perencanaan warga sendiri sampai teknis pelaksanaan tetap gak pernah ada kendala. Artinya masyarakat sangat antusias, karena itu kita yang butuh.”²

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa partisipasi dalam perencanaan di Desa Sumber Urip masyarakat sangat antusias dalam perencanaan dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dapat ditunjukkan

² Hasil wawancara dengan Bapak Yudho Iskandar selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumber Urip, Tanggal 15 september 2021, pkl 16:20 WIB

dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya ikut dalam kegiatan perencanaan yang meliputi musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait perencanaan program yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDDes, ketika dokumen RPJMDes dan RKPDDes selesai, maka setiap desa harus memiliki APBDes selanjutnya setelah APBDes disahkan maka pelaksanaan pembangunan desa akan melewati beberapa tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan program pembangunan diawali dengan penyusunan RAB. Sebelum penyusunan RAB perlu dipastikan tersedia data standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan ini diserahkan oleh pemerintah Desa Sumber Urip kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Tahap pelaksanaan pembangunan diawali dengan kegiatan sosialisasi pertemuan mengenai program kerja desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan ini, pola partisipasi masyarakat tercermin ikut andilnya masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Sumber Urip.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumber Urip adalah partisipasi tenaga/swadaya, partisipasi yang dilakukan

secara bergotongroyong pada setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Noval Kurniawan selaku Pordakwis bahwa:

“untuk pelaksanaannya kita serahkan ke masyarakat jadi kita rencanakan memang untuk memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat itu nanti partisipasi ya itu tenaga atau swadaya. Untuk menggali swadaya masyarakat itu memang semua program masyarakat itu dikerjakan masyarakat, kita hanya membantukan berwujud bahan materil saja”³

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan Desa Sumber Urip adalah menyumbangkan tenaga nya berdasarkan keyakinan sendiri dan juga berdasarkan perintah dari pemerintah desa maupun pihak lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Vidi Juliansyah selaku anggota pordakwis Desa Sumber Urip bahwa: “ selama ini pelaksanaan program dana desa partisipasi masyarakat di Desa Sumber Urip dilakukan dengan cara transparansi keuangan dana desa dan mempercepat terlaksananya program pembangunan desa yang dibuat oleh masyarakat Desa Sumber Urip dengan tujuan mempermudah Desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari”⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui masih tingginya partisipasi masyarakat desa secara nyata dalam bentuk swadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan dan faktor pendukung lainnya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengamatkan untuk memperkuat aspek keuangan desa.

Partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan selalu mengikutsertakan swadaya masyarakat hal ini menurut hasil wawancara telah disampaikan pada saat musyawarah RT, musyawarah

³ Hasil wawancara dengan Bapak Noval Kurniawan selaku Pordakwis Desa Sumber Urip, Tanggal 15 september 2021, Pkl. 17:00 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Vidi Juliansyah selaku Anggota Pordakwis Desa Sumber Urip, Tanggal 16 september 2021, pkl. 14:00 WIB

perencanaan pembangunan desa. Artinya pada setiap pelaksanaan pembangunan program yang telah disusun masyarakat, harus menggunakan tenaga masyarakat dalam pengerjaannya sehingga program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal dan menunjang suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi merupakan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan program pembangunan yang dikelola dengan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi sangat penting, karenadalam program pembangunan masyarakat merupakan penggerak dari pembangunan maka sudah seharus masyarakat dilibatkan dalam hal evaluasi pembangunan bertujuan agar dapat dicapai pembangunan seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan serta mencari solusi pemecahan dalam setiap permasalahan mengenai pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahap evaluasi yaitu: (1) menetapkan apa yang akan dievaluasi; (2) menyusun rencana evaluasi; (3) pengumpulan data (4) Analisi dan presentasi Data; (5) pengambilan keputusan.

Pada tahap evaluasi pembangunan di Desa Sumber Urip Menurut Ibu H. Mardiani selaku Ibu Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“dilakukan setelah terselesaikan pelaksanaan pembangunan. Pengevaluasi pembangunan dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh pemerintah Desa berdasarkan perwakilan-perwakilan dari setiap masyarakat yang ada.”⁵

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini adalah terlibat langsung ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sumber Urip yang dibentuk oleh Desa untuk melakukan evaluasi pembangunan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak H. Ngadikun selaku Imam Masjid dalam wawancara menyatakan bahwa:

“partisipasi masyarakat ya, tergabung kedalam Tim yang biasa melakukan evaluasi TPK. Jadi TPK itu yang melakukan evaluasi. TPK diambil dari gabungan masyarakat-masyarakat Desa Sumber Urip”⁶

Pelaksanaan program DD (Dana Desa) dalam partisipasi Masyarakat di Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang dilakukan atas transparansi keuangan pengelolaan dana desa. Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja serta pembiayaan desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu H. Mardiani selaku Ibu Rumah Tangga Desa Sumber Urip, tanggal 15 september 2021, Pkl 17:20 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Ngadikun selaku Imam Masjid Desa Sumber Urip tanggal 15 september, pkl, 17:50 WIB

Transparansi anggaran desa merupakan syarat mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Salahsatu bentuk pengumuman kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumber Urip yaitu melalui media baliho atau papan pengumuman penggunaan anggaran.

Menurut penjelasan bapak Suwarman selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumber Urip menyatakan bahwa:

“transparasi pengumuman kebijakan anggaran, kita selalu membuat Baliho atau papan pengumuman dari sana masyarakat bisa tahu untuk apa saja penggunaan anggaran desa masyarakat bisa melihat pengumuman kebijakan anggaran melalui papan pengumuman yang kita tempel ditempat yang strategis.”⁷

Selanjutnya hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Sigit Widiyanto selaku Badan Pengawas Desa Sumber Urip dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Terkait pengumuman anggaran kita pampang di Baliho seperti di perempatan itu. Itu kita pampang biar masyarakat tahu, selain itu juga ada sosialisasi kesetiap Desa. Jadi kita sampaikan dana untuk anggaran ini ada sekian, untuk pembangunan sekian biar jelas otomatis masyarakat sudah mengetahui dan secara umum kita pampangkan ditempat-tempat yang strategis untuk diketahui banyak orang.”⁸

Berdasarkan penjelasan pengawas Desa Sumber Urip di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsip pengumuman kebijakan anggaran ini, pemerintah desa sudah melakukan dengan baik. Salah satu bentuk

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak suwarman selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumber Urip, Tanggal 16 september 2021, pkl, 14:00 WIB

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Widiyanto selaku Badan pengawas Desa Sumber Urip, Tanggal 16 september 2021, pkl, 14:30 WIB

pengumuman kebijakan anggaran di desa selain itu menurut Bapak Heriono selaku kepala Unit Wisata Desa Sumber Urip menyatakan bahwa:

“pengumuman kebijakan anggaran juga dilakukan melalui forum pertemuan dengan Tokoh dan Lembaga Masyarakat yang dilakukan setiap bulan untuk membahas dan menyampaikan pangunaan anggaran desa. Ini merupakan upaya pemerintah desa Sumber Urip dalam memberikan Informasi kepada Masyarakat terkait Pengumuman kebijakkan anggaran.”⁹

Kemudian akses dokumen anggaran adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Akses secara langsung yaitu informasi yang didapat langsung berhadapan dengan pihak terkait mengenai informasi yang dibutuhkan.

Desa Sumber Urip berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bentuk kemudahan akses dokumen anggaran Desa Sumber Urip dapat dilakukan melalui data laporan keuangan yang ada di kantor desa. Kemudian dilakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang berpendapat sama bahwa sistem pemberian informasi anggaran dilakukan sosialisasi ke setiap desa pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat pemberdayaan masyarakat dalam Program Anggaran Dana Desa

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Sumber Urip menyebutkan bahwa Desa Sumber Urip menerima ADD sejak tahun 2015. Pemerintah Desa selama ini telah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Heriono selaku Kepala Unit Wisata tanggal 16 september 2021, Pkl, 15:00 WIB

melalui Kecamatan, seperti menanyakan kesulitan yang dialami oleh Masyarakat dan juga sosialisasi mengenai jumlah dana desa maupun menempelkan Baliho dana desa pada jalan umum. dana desa yang telah digulirkan ke masyarakat selama ini telah bermanfaat dengan baik seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa dan Masyarakat seperti perbaikan infrastruktur jalan satu kampung yang dibetonisasi dan pembuatan senderan jalan. Jadi keseluruhan dana desa dimanfaatkan secara operasional 30% untuk belanja pegawai, tunjangan BPD, tunjangan LKMD, tunjangan kades, dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana desa telah melibatkan masyarakat dengan baik melalui musrenbangdes, sehingga segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa dapat dilakukan dengan baik melalui dana desa. Hal ini bukti bahwa dana desa yang berada di Desa Sumber Urip realitanya telah dapat memberdayakan masyarakat. Tidak hanya itu masyarakat Desa Sumber Urip Juga dilibatkan dalam proses perencanaan, dengan proses awal melalui musyawarah desa. Pada forum itu masyarakat diberikan kebebasan untuk menuangkan ide-idenya dan bahkan ada masyarakat yang mengajukan proposal pada saat musyawarah desa berlangsung.

1. Faktor Pendukung

Dalam pengawasan masyarakat juga dilibatkan meninjau ulang kegiatan dana desa karna pemerintah desa bersikap transparan dan akuntabel dalam mengimplementasikan dana desa di masyarakat. Selama menjalankan aktivitas kegiatan yang di biyai dana desa, masyarakat

melakukan atas inisiatif sendiri dengan dikoordinir oleh perangkat setempat. Berdasarkan pengamatan Kepala Desa Sumber Urip sebagai langkah mendukung kelancaran dalam pemanfaatan dana desa, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelatihan tentang pelaksanaan dana desa yang dilaksanakan di Kecamatan dana Pelatihan tersebut diambil dari dana Pendamping setiap tahunnya.

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat di ungkapkan oleh Bapak Yudhi Sutanto selaku Kepala Desa juga mengungkapkan, “selama ini masyarakat telah mengelola dengan baik dana desa buktinya kegiatan yang ada baik fisik maupun nonfisik tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat. Bahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, semua masyarakat tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Sehingga dana desa yang ada sudah layak dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam membangun desa.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa masyarakat sudah sewajarnya mengetahui pertanggungjawaban, mengingat masyarakat terjun langsung di dalam pengelolaan. Keberhasilan masyarakat dalam berpartisipasi dapat dinilai sebagai wujud turut dilibatkannya masyarakat sampai pada tahap perencanaan.

Faktor pendukung yang ditemui oleh Ibu Eli Yuningsih selaku Kepala Unit Jasa Keuangan “pemerintah desa bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah dana desa yang diterima dan juga adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mempersiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tepat waktu.”¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Sutanto Selaku Kepala Desa Sumber Urip, Tanggal 22 September 2021 Pukul 14:00 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Eli Yuningsih Selaku Kepala Unit Jasa Keuangan, tanggal 25 September 2021 Pukul 10.30 WIB

Masyarakat desa Sumber Urip menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan sosialisasi program dana desa kepada mereka melalui rapat musyawarah desa dengan mengundang masyarakat desa. Masyarakat mengatakan bahwa program dana desa yang diterima Desa Sumber Urip sangat bermanfaat oleh masyarakat karena sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sudiono selaku masyarakat Desa Sumber Urip faktor pendukungnya yakni :“bahwa Pemerintah desa melakukan sosialisasi dana desa kepada mereka melalui rapat musyawarah desa dengan mengundang semua masyarakat desa dan semua elemen di desa. Masyarakat mengatakan bahwa dana desa yang diterima Desa Sumber Urip sangat bermanfaat oleh masyarakat karena sesuai dengan aspirasi masyarakat.”¹²

Penyaluran dana desa berdasarkan informasi dari masyarakat telah melibatkan masyarakat dengan baik karena penyaluran sesuai rencana yang semuanya itu atas kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa.

Selain itu ada juga di ungkapkan oleh Ibu Setio Rini selaku sekretaris faktor pendukung ia mengungkapkan “ koordinasi dan komunikasi yang erat antara pemerintah desa dengan masyarakat, transparansi pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan dana desa, aspirasi masyarakat dengan kegiatan dana desa.”¹³

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Sudiono selaku masyarakat, 25 september 2021 pukul 14.00 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Setio Rini selaku Sekretaris Desa, Tanggal 25 September 2021 Pukul 16:10 WIB

Kepala desa dan masyarakat menjelaskan secara rinci bahwa masyarakat sudah sewajarnya mengetahui pertanggungjawaban dengan program dana desa, mengingat masyarakat turun langsung di dalam pengelolaan dana desa. Keberhasilan masyarakat dalam partisipasi dapat dilihat sebagai wujud turut di libatkannya masyarakat sampai pada tahap perencanaan. Tahapan perencanaan dimulai dari berbagai gagasan yang dicetus masyarakat yang dilakukan dari musyawarah desa. Dalam mengelola dana desa masyarakat melakukan musyawarah, usulan pertanggung jawaban dan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa dengan melibatkan masyarakat langsung, perangkat desa dan semua unsur desa, bahkan dengan adanya anggaran dana desa kesejahteraan masyarakat meningkat karena kebutuhan penunjang dan urgensi masyarakat telah terpenuhi.

2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pogram Anggaran Dana Desa

Dengan demikian dapat dilihat dari beberapa faktor yang berasal dari luar diri masyarakat diantaranya kurang nya komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial dalam masyarakat, berdasarkan peranan pemerintah desa maupun masyarakat adalah merencanakan dan mengorganisir program anggaran dana desa dengan menyediakan tehnik dan bantuan pokok, diluar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi. Sejalan perkembangnya, masyarakat dalam mengelola ADD juga dihadapkan dengan faktor penghambat adalah keterbatasan dana yang tidak bisa mengkomodir kebutuhan masyarakat desa.

di ungkapkan oleh Bapak Sumarno bahwa faktor penghambat program anggaran dana desa : “ pihak masih belum memaksimalkan pemanfaat waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana desa karena kedisiplinan waktu sangat penting dalam aspek ketetapan waktu dan faktor cuaca yang tidak dapat di perkirakan dalam penyuplaian bahan-bahan bangunan yang digunakan.”¹⁴

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa masalah yang dapat memperlambat terlaksananya proses pembangunan yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga adanya faktor penghambat ini maka proses pelaksanaan kegiatan pembangunan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumarno Selaku Kadus Sumber Urip, Tanggal 27 september 2021, Pukul 14:30 WIB

desa akan terganggu penyelesaiannya sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tidak tepat waktu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sudiono selaku Masyarakat Desa Sumber Urip menyatakan bahwa: “ keterbatasan dana desa yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa anggaran dana desa yang telah bergulir di masyarakat secara bermanfaat bagi masyarakat seharusnya desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasilnya dapat dipelihara secara baik demi kelanjutannya. Seperti diketahui bahwa masyarakat desa yang memperhitungkan sendiri pengeluaran untuk pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola anggaran dana desa adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program dana desa yang ada di desa nya. Pengelolaan anggaran dana desa harus menyatu didalam pengelolaan APBD sehingga prinsip pengelolaan anggaran dana desa sama persis dengan pengelolaan APBD yang harus mengikuti prinsip good governance yaitu partisipasi proses pengelolaan anggaran dana desa sejak perencanaan, evaluasi harus melibatkan banyak pihak.

Dengan demikian peranan pemerintah daerah maupun pemerintah desa adalah merencanakan dan mengorganisir program anggaran dana desa

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sudiono Selaku Masyarakat Sumber Urip, Tanggal 27 September 2021, Pukul 16.00 WIB

dengan menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan pokok, diluar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi non pemerintah lainnya. Oleh karenanya partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat desa, mengingat masyarakat yang memahami dan mengerti kondisi lingkungannya.

Berdasarkan penelitian diatas, anggaran dana desa yang telah bergulir di masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat diantaranya desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya. Seperti diketahui bahwa masyarakat desa yang memperhitungkan sendiri pengeluaran untuk pembangunan fisik, tanpa mencari keuntungan masyarakat mengalokasikan sebesar-besarnya dana yang ada untuk perbaikan jalan. Bahkan tenaga masyarakat dengan sukarela dipertaruhkan demi kepentingan bersama, tanpa mengenal lelah dan waktu masyarakat menyelesaikan pekerjaan jalan yang dilakukannya saat ini, tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, disebabkan pembangunan didesa sampai didusun sudah mengalami perubahan. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa, sebelum adanya anggaran dana desa belanja operasional pemerintah desa besarnya tidak pasti. Karena dalam ketentuannya sudah dijelaskan 30% untuk operasional pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama

menunggu datangnya program dari pemerintah daerah untuk pemberdayaan masyarakat. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten, desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa, dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa.

Anggaran dana desa dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerjasama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

Partisipasi masyarakat dalam mengelola anggaran dana desa adalah hak bagi warga untuk menyuarakan, mengakses, mengontrol program anggaran dana desa yang ada di desanya. Sedangkan dampak tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut disebut swadaya. Pengelolaan anggaran dana desa harus menyatu didalam pengelolaan APBD sehingga prinsip pengelolaan APBD sama persis dengan pengelolaan APBD yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi proses pengelolaan anggaran dana desa sejak perencanaan, pelaksanaan, partisipasi, pengambilan keputusan dan evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam mengelola anggaran dana desa tidak hanya melibatkan para elit saja tetapi juga harus

melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, masyarakat. Sedari awal dilokasi sampel menjadi tolak ukur keberhasilan anggaran dana desa, tanpa masyarakat anggaran dana desa tidak dapat terealisasi dengan sempurna, dan tanpa masyarakat pula anggaran dana desa tidak bermanfaat apapun.

Transparansi semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, Sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini. Sikap transparansi dilokasi sudah diterapkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, bahkan masyarakat mengetahui melalui poster tentang pengumuman anggaran dana desa.

Sehubungan dengan itu seharusnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama pendukung keberhasilan anggaran dana desa, masyarakat penggerak terciptanya pembangunan masyarakat desa, ditangan masyarakatlah maju mundurnya desa menjadi prinsip yang harus dipahami oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perencanaan, pelaksanaan, partisipasi masyarakat dan evaluasi terwujudnya kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyimak uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Sumber Urip dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, Partisipasi maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan evaluasi.
2. Faktor pendukung dan penghambat di antaranya yaitu
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang berkoperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan dana desa di wilayah Desa Sumber Urip sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan.
 - 2) Partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan dana desa.
 - 3) Sikap mental pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana desa.

4) Masyarakat kritis dalam mengawasi pelaksanaan dana desa sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa.

b. Faktor penghambat

1) Keterbatasan pada dana yang masih minim yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2) Minimnya ketersediaan dana desa yang tidak semuanya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, di sarankan

1. Hendaknya pemanfaat dana desa tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik semata, karena banyak aspek lainnya yang perlu menjadi atensi semua pihak.
2. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan SPJ, mengingat di sekitar desa banyak masyarakat yang berpotensi dan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan mampu di berdayakan secara maksimal dalam proses pembuatan laporan.
3. Menambah anggaran Dana Desa dari yang semestinya, mengingat Dana Desa sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan Desa.
4. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa perlu mendapat pengawasan dari pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anita fauziah, pemberdayaan masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, (Malang 2009),

Aswas, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, 2014,

Azwardi Sakanto ‘ ‘ Efektifitas Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan ’ ’ (Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya,2012)

Bernandus Seran Kehik, Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan, Jurnal Agribisnis vo.3(1)

Craight Mayo dalam Hikmat, Pemberdayaan Masyarakat, 2010

Dwidjowijoto, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Pendidikan Manajemen vo. 10 (1), 2018: 146-154

Gideens, Anthony, Sociology, Cambridge, polity Pres. Thn 1991

Hasil wawancara Bapak sigit widianto

Hasil wawancara dengan Bapak H. Ngadikun selaku Imam Masjid Desa Sumber Urip

Hasil wawancara dengan Bapak Heriono selaku Kepala Unit Wisata

Hasil Wawancara dengan Bapak Sudiono Selaku Masyarakat Sumber Urip,

Hasil Wawancara dengan Bapak Sumarno Selaku Kadus Sumber Urip

Hasil wawancara dengan Bapak Yudhi Sutanto selaku Kepala Desa Sumber Urip,

Hasil wawancara dengan Bapak Yudho Iskandar Selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumber Urip

Hasil Wawancara dengan Ibu Eli Yuningsih Selaku Kepala Unit Jasa Keuangan

Hasil wawancara dengan Ibu H. Mardiani selaku Ibu Rumah Tangga Desa Sumber Urip

Hasil Wawancara dengan Ibu Setio Rini Selaku Sekretaris Desa

Hasil wawancaran dengan Bapak suwarman selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumber Urip

Hikmat, Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, h. 143-144

<https://sekolahdesa.or.id> di akses pada tanggal 23 juli 2021. pada pukul 20. 55 WIB

- Ir. Hendrawati Hamid, M.Si. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar, Penerbit De La Macca, 2018),
- Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu social Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995)
- Lexi j. Moelong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung; Pt Remaja Rosdakarya (2016)
- M Indra Maulana ''Peran Dana Desa dalam memberdyakan masyarakat ditinjau dari prespektif ekonomi islam (studi kasus didesa sinar Palembang kec. Candipura, kab lampung selatan)'' skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2018
- M syaifuddin, *Pembangunan Masyarakat Dengan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Majalah Mufidah Media Informasi Dakwah Pembangunan, Vol 12 juli 1999, h. 27*
- M. Istan, *Implementasi Dana Desa Di Desa Air Meles Bawah kecamatan curup Timur, Rejang Lebong Bengkulu*
- Mardikanto dan Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif kebijakan publik*, Bandung 2012,
- Marzuki *Metodologi Riset panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005) , Cet. Pertama, Ed. ke-2, h. 14
- Muhammad Istan, *implementasi Dana Desa Di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Ecces (Economics, social, and Development Studies)*, 2017,
- Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988)
- Only s. priyono dan A. M. W Pranata, *Mengenai Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementas*, (CSIS: Jakarta, 1996)
- Oos M. Anwas, *pemberdayaan masyarakat di Era Global*
- Rumlan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2014)
- Siti Ainul, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntabilitas vo.4 (2), 2017:*
- Siti Muntahanah, *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Poerwokerto: 2009,*
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D* (Bandung Alfabeta)

Venugopal dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012

Vivi Meditasari, Persepsi Santri Ma'had Al-jamiah STAIN CURUP Terhadap Manajemen KoperasiManajemen Koperasi Santri, skripsi (Program Studi Perbankan Syari'ah, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN CURUP 2017

www.djpk.kemenkeui.go.id, diakses hari jum'at, 23 juli 2021, pukul 19. 29

Zubaedi, pengembangan masyarakat wacana dan praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)

Zubaedy, pengembangan masyarakat: Wacana dan Praktek, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013)edisi ke-1,